



Editor :

I Wayan Gede Suacana

APLIKASI *Sakti* PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

I Gusti Ngurah Dharma Astawa | I Made Yudhiantara
I Gede Agus Wibawa



APLIKASI *Sakti* PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren global dewasa ini, termasuk digitalisasi sektor pemerintahan yang lebih dikenal dengan Electronic Government (E-Government). Pengembangan E-Government oleh suatu institusi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas informasi dan layanan secara cepat dan efisien, tidak hanya antar institusi tetapi juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Seiring dengan penyebaran internet secara global, E-Government secara aktif digunakan di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir semua negara telah mengembangkan situs web pemerintah. Transformasi layanan E-Government memiliki banyak manfaat seperti penyediaan layanan hemat biaya, pengurangan biaya administrasi, dan percepatan pengambilan keputusan-keputusan manajerial.

Dalam perkembangannya istilah E-Government berubah menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seiring terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE memberikan informasi dan layanan, meliputi: Government to Citizen, mencakup interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, serta memberikan kemudahan akses informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat; Government to Business, merupakan hubungan antara pemerintah dengan sektor usaha/bisnis, dengan tujuan memudahkan kelompok usaha untuk mengakses informasi dan transaksi sektor bisnis; Government to Government, adalah keterbukaan informasi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, serta memudahkan dilakukannya kerja sama antar pemerintahan di berbagai sektor; Government to Employee, merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawai pemerintahan, dengan tujuan peningkatan kinerja serta kesejahteraan PNS dan Government to Non Profit, merupakan tipe relasi antara pemerintah dengan lembaga non profit, dengan tujuan agar lembaga non profit ini dapat dikelola dengan baik, sehingga memudahkan pencapaian tujuan masing-masing.

Terkait dengan itu, maka SAKTI Full Modul yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Kementerian/Lembaga Pengelola APBN, termasuk Satuan Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali mulai diimplementasikan pada tahun 2022. Dengan diimplementasikan SAKTI ini diyakini kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan bisa mendukung pengelolaan keuangan negara mulai tahap penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Hanya saja masih diperlukan peningkatan performa SAKTI seperti pembaharuan fitur aplikasi, mekanisme validasi, peningkatan kapasitas server SAKTI dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan terpadu.



eureka
media akhara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-077-8



9 786231 510778

APLIKASI “SAKTI” PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

I Gusti Ngurah Dharma Astawa
I Made Yudhiantara
I Gede Agus Wibawa



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

APLIKASI “SAKTI” PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Penulis : I Gusti Ngurah Dharma Astawa
I Made Yudhiantara
I Gede Agus Wibawa

Editor : I Wayan Gede Suacana

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Vivi Fajar Setyaningrum, S.Pd.

ISBN : 978-623-151-077-8

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Aplikasi “SAKTI” Pengelolaan Keuangan Negara”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren global dewasa ini, termasuk digitalisasi sektor pemerintahan yang lebih dikenal dengan *Electronic Government (E-Government)* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas informasi dan layanan secara cepat dan efisien, tidak hanya antar institusi tetapi juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Tahun 2022 merupakan awal implementasi SAKTI Full Modul yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Kementerian/Lembaga Pengelola APBN. Melalui buku ini penulis implementasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan negara, dan untuk mengetahui apakah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan mendukung kepuasan pengguna, kinerja individu, dan memberikan manfaat bagi organisasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN	7
A. Pengertian Sistem Informasi	7
B. Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara	9
C. Keberhasilan Sistem Informasi	9
D. Kualitas Pengelolaan Keuangan	10
E. Integrated Financial Management Information System (IFMIS)	11
F. Model Kesuksesan Sistem Informasi.....	12
BAB 3 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)	14
A. Pengertian Aplikasi SAKTI	14
B. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	15
C. Pengguna SAKTI.....	17
D. Modul Aplikasi SAKTI	18
BAB 4 PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI PADA BPKP	34
A. Profil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	34
B. Struktur Organisasi BPKP Provinsi.....	37
C. Kualitas Sistem SAKTI.....	39
D. Kualitas Informasi SAKTI	44
E. Kualitas Layanan SAKTI	49
DAFTAR PUSTAKA	51
TENTANG PENULIS.....	55
TENTANG EDITOR.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 SAKTI terintegrasi.....	17
Gambar 3.2 Modul Penganggaran.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi.....	38
Gambar 4.2 Integrasi Data dalam SAKTI.....	43
Gambar 4.3 Dokumen RKA K/L SAKTI.....	46
Gambar 4.4 Dokumen RKA K/L SAKTI.....	47
Gambar 4.5 Laporan Bendahara.....	48
Gambar 4.6 Bentuk Surat Perintah Membayar.....	49
Gambar 4.7 Layanan HAI CSO DJPb.....	50



**APLILASI “SAKTI” PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

I Gusti Ngurah Dharma Astawa



BAB

1

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah bagian dari perubahan besar dalam pandangan dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik secara akuntabel, serta berpedoman pada nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selaku penerima layanan. Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan media komunikasi, profesionalisme pegawai, dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi merupakan sebuah usaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil

BAB

2

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengertian Sistem Informasi

Whitten dan Bentley (2007) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah suatu pengaturan dari orang, data, proses, dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menghasilkan kegunaan yang berupa informasi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu organisasi.

Menurut James O'Brien (2010) sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit dikelola orang (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), jaringan komputer dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang yang bentuk organisasi.

Dalam pembahasan lain menurut Gelinas dan Dull (2010), *information system is a manmade system that generally consist of an integrated set of computer-based components and manual components established to collect, store, and manage data and to provide output information to users*. Dapat diterjemahkan bahwa sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang umumnya terdiri dari serangkaian komponen berbasis komputer yang terintegrasi dan komponen manual yang dibentuk untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan memberikan informasi *output* ke pengguna.

BAB 3

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

A. Pengertian Aplikasi SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang dikembangkan sejak tahun 2015, yang digunakan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai uji coba. SAKTI yang digunakan tahun 2022 adalah penggabungan dari aplikasi yang telah ada sebelumnya, yaitu aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), Sistem Akuntansi Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), aplikasi Gaji Pemerintah Pusat (GPP), aplikasi Bendahara (SILABI dan SIMPONI), dan aplikasi Persediaan.

Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang sebelumnya parsial/terpisah-pisah, juga mengadopsi proses bisnis baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Beberapa modul transaksi yang digabungkan pada SAKTI terbaru yaitu modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, dan modul administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database yang sama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi SAKTI sebelumnya.

BAB 4

PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI PADA BPKP

A. Profil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi adalah bagian unit kerja BPKP yang memiliki visi “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam upaya mewujudkan visi BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi telah menetapkan dua misi, yaitu:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui fungsi pengawasan intern atas kegiatan tertentu. Selain itu, memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kedudukan, tugas, dan fungsi BPKP bertanggungjawab kepada

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. 2004. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21. Kementerian Komunikasi dan Informasi. <http://www.kominfo.go.id>.
- Andy Noviwijaya dan Sony Warsono, 2019. Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua (Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan).
- Anjahul Khuluq, Windu Gata, Jordy Lasmana Putra, Hafifah Bella Novitasari. 2022. "Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Single Database SAKTI menggunakan Finite State Automata". Jurnal Sains Komputer dan Informatika Volume 6 Nomor 1, pp 232 - 241.
- Arifin Zainal, Dr. 2017. *Adopsi Teknologi untuk Keunggulan Daya Saing*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
- Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper disajikan pada *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli - 1 Agustus 2009.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2nd ed. Sage Publications, Inc. United State of America.
- Curtis, M.B dan Payne, E.A.2008. An Examination of Contextual Factors and Individual Characteristics Affecting Tachnology Implemetation Decisions in Auditing. *International Journal of Accounting Information Systems*. Vol. 9, 104 - 121.
- Damascene, Jean Twizeyimana, Annika Anderson. 2019. *The Public Valve of E Government*.Government Information Quarterly Journal.

- DeLone, W. H., Mclean, E. R. 1992. Information System Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information System Research*, 3 (1): 60 - 95
- DeLone, W.H., and McLean E.R. 2003. The DeLone and McLean Model of Information System Success: A Ten Year Update. *Journal of Management Information System*. Vol. 19, No. 24, p. 9-30.
- Edy Nasrudin. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Penerimaan, Penggunaan, dan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi”.
- Halim, Abdul. 1994. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Harash E., Al-Timimi, S., dan Radhi A., Hussein. 2014. The influence of accounting information systems (AIS) on performance of small and medium enterprises (SMEs) in Iraq. *Journal of Business & Management*. Vol. 3, No. 4, p: 48 - 57.
- Harnowo, S., Santoso, B., & Suryani, E. 2021 “Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi: Pendekatan Human-Organization-Technology (HOT) Fit Framework” *E-Jurnal Akuntansi*, 31 (3), 769 - 781.
- Heru Pudyo Nugroho dan Jamila Lestyowati, 2020. Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi dengan Pieces Framework.
- I Gede Agus Wibawa, 2017. “Reformasi Kelembagaan Menuju Tata Pemerintahan dan pelayanan Publik Yang Berkualitas”. *Sintesa Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8, Nomor 1, Maret 2017, p. 45 - 51.
- I Made Yudhiantara, 2019. “Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya”. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Im, I. Hong, S dan Kang, M.S.2011. An International Comparison of Adoption Testing The UTAUT Model. *International &*

Management 48. Vol. 1. No. 8.

- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Jus Samuel Sihotang, 2020. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
- Kukuh Haryu Pambudi, 2018. Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Lee, Y.C., Lee, M.L., Yen, T.M dan Huang, T.H. 2010. Analysis of Adopting an Integrated Decisions Making Trial and Evaluation Laboratory on A Technology Acceptance Model. *Expert System with Application*. Vo. 37, 1745 - 1754.
- Livari, J. 2005. An Empirical Test of the DeLone-Mclean Model of Information System Success. *The DATA BASE for Advances in Information Systems*. (36: 2). Spring.
- Mukhtaromin, 2018. Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Oka Ariartha, Ida Bagus. 2016. Tesis. *Kesuksesan Pengadopsian E-Monitoring Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali*. Universitas Udayana.
- Otley, D.T. 1980. The Contingency Theory of Management Accounting: Acheivement and Prognosis". *Accounting, Organizations and Society*. p: 422.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*.
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Rimawati, Yuni, 2012. *Keberhasilan Impelementasi Elektronik Government Berdasarkan Persepsi Pengguna*. Jurnal

Multiparadigma (JAMAL) Vol. 3. ISSN 2086 - 7063.

Sawyer, Lawrence B. Dittenhofer Mortimer A. 2006. *Internal Audit*.
Diterjemahkan Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Venkatesh, V., Zhang X. 2010. "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: U.S. VS. China," *Journal of Global Information Technology Management*. Vol. 13, No. 1, p: 5 - 27.

TENTANG PENULIS

I Gusti Ngurah Dharma Astawa

Lahir di Tabanan, 10 Juni 1980 adalah Auditor Muda pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Tamat SMUN 2 Tabanan (1998), Politeknik Negeri Bali (2001), Pendidikan Ajun Khusus Auditor di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005), dan S1 Akuntansi Universitas Warmadewa Denpasar (2016).

Mengawali karir di BPKP sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Papua (2006), Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (2011), Auditor Pertama hingga Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Bali (2015 s.d. sekarang). Dalam kesehariannya selain sebagai Subkoordinator Keuangan juga rutin mengajar dalam diklat-diklat penjenjangan auditor dan pengelolaan keuangan negara/daerah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penulis beristrikan Gusti Ketut Kartika, SE., M.Si., dan dikaruniai tiga orang putra. Alamat E-mail penulis: ngurahdharumasatya@gmail.com.

I Made Yudhiantara

I Made Yudhiantara lahir di Singaraja, 18 Agustus 1967 adalah seorang dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar sejak 1 Februari 1994. Jabatan penulis yaitu sebagai Lektor Kepala, dengan SK Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 24 Mei 2006. Jabatan saat ini sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar sejak 17 Maret 2023.

Pengalaman jabatan struktural yang pernah diampu yaitu:

1. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisipol Unwar (periode 1997 – 2001)
2. Pembantu Dekan I Fisipol Unwar (periode 2004 – 2006)
3. Dekan Fisipol Unwar (periode 2006 – 2007)
4. Pembantu Rektor I Universitas Warmadewa (periode I, tahun 2007 – 2011) dan periode II (tahun 2011 – 2012)

5. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar (2022)
6. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar (dilantik 17 Maret 2023)

Pengalaman jabatan non struktural yaitu sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Wicaksana Universitas Warmadewa (1995-1998), Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Politik Sarati (2003-2007), Pemimpin Redaksi Majalah Kampus Singhadwala (2008-2011). Dalam kesehariannya aktif menulis dan menerbitkan literatur maupun jurnal tentang administrasi publik.

I Gede Agus Wibawa

I Gede Agus Wibawa lahir di Mataram, 11 Juli 1976 adalah seorang Dosen. PNS yang meniti karir pada LLDIKTI VIII Diberbantukan pada Universitas Warmadewa. Tamat SMAN 1 Mataram (1994), STPDN Jatinangor Jawa Barat (1998), Pendidikan S2 PSDM Pemerintahan Universitas Airlangga Surabaya (2004), dan menempuh Program Doktor Ilmu Administrasi pada Universitas Brawijaya Malang (2011).

Mengawali karir di dunia kerja sebagai Sekretaris Lurah Dauharu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Subbidang Pengawasan Kearsipan DPK Jembrana, sebelum mengabdikan di dunia pendidikan sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Warmadewa, Denpasar dan sebagai Dosen pada Universitas Ngurah Rai Denpasar.

Dalam kesehariannya aktif menulis dan menerbitkan literatur maupun jurnal tentang administrasi publik. Alamat E-mail penulis: benkland@yahoo.com. Website yang dimiliki penulis Bernama www.gusbenk.wordpress.com

TENTANG EDITOR

I Wayan Gede Suacana

I Wayan Gede Suacana, lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Dokter dan Ilmu Kesehatan dan Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa (Unwar). Tamat SMAN 3 Denpasar (1985), S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1990), S2 Administrasi Publik UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya Unud (2008). Kini sebagai Ketua Pusat Kajian Pancasila; Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Magister Administrasi Publik dan Pembina Forum Yoga & Meditasi Unwar.

Mendapat penghargaan sebagai lulusan S2 dan S3 dengan predikat *Cumlaude* dan sebagai Pemenang I Lomba Karya Tulis/ Esai bertema “Upaya Cerdas Memilih Pemimpin Bali: Problema dan Pemecahan” diadakan oleh Wanita Penulis Indonesia (WPI) Cabang Bali (2008). Tujuh kali mendapatkan Hibah Multitahun Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Ditjen Dikti Ristek, yang luarannya telah dipublikasikan baik dalam jurnal terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional. Selaku penulis dan editor beberapa buku ber-ISBN, diantaranya: *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris bagi Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penerbit Qiara Media Partner, 2020; *Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali*, Penerbit Literasi Nusantara, 2021 dan *Kapita Selekta Pemerintahan Seri I dan II*, Penerbit Literasi Nusantara dan Eureka Aksara, 2022. Delapan buah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta Buku dan Artikel telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Menulis 69 artikel lepas tentang *Governance* pada rubrik Opini Harian Umum Bali Post dari 2003 s.d. 2013.

Pendonor darah sukarela dan Pengelola Pondok Satya, Pondok Prema dan Pondok Sai Amrita Ubud ini beristri Dra. Ni Nyoman Trisna Yudhani, Apt. dikaruniai dua orang anak serta seorang cucu. Alamat E-mailnya: suacana@gmail.com